
Analisis Inovasi Sistem Informasi Kerjasama (SIMASKER) dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Rizky Ar Ridho

Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan "veteran" Jawa Timur

Email Korespondens: 23041010167@student.upnjatim.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

The development of digital transformation has to introduce public service innovations in order to improve efficiency and the quality of governance. One such innovation is the implementation of the Cooperation Information System (SIMASKER), as part of the SATRIA ROPEM program. This study aims to analyze SIMASKER as a public service innovation in supporting the management of regional cooperation. The research descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Everett M. Rogers' innovation characteristics theory. The findings indicate that SIMASKER provides a relative advantage over previous mechanisms by enhancing administrative efficiency, transparency, and ease of access to information. In terms of compatibility, the system is able to adapt to regulatory changes without diminishing its primary function in managing regional cooperation.

Keywords: Public Service Innovation, Government Governance, Regional Cooperation

ABSTRAK

Perkembangan transformasi digital untuk melakukan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Bentuk inovasi tersebut penerapan Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER) sebagai bagian program SATRIA ROPEM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIMASKER sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendukung pengelolaan kerja sama daerah. Metode adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori karakteristik inovasi Everett M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMASKER memiliki keunggulan relatif dibandingkan mekanisme sebelumnya melalui peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan akses informasi. mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi tanpa menghilangkan fungsi utama pengelolaan kerja sama daerah.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Kerja Sama Daerah

PENDAHULUAN

Kemajuan inovasi, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, telah memberikan manfaat yang memberikan keuntungan kehidupan. Kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat pada era ini turut mendorong percepatan pola interaksi sosial, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, serta khususnya dalam sektor pemerintahan. Hal ini berdampak pada tata kelola pemerintahan khususnya layanan pelayanan publik digital. Digitalisasi pelayanan publik, yang dikenal sebagai e-government, merupakan langkah strategis pemerintah sebagai upaya memperkuat efisiensi serta dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan. . (Pancasakti Makassar, 2023). Perkembangan menuju penerapan e-government memberikan berbagai manfaat, salah satunya adalah terciptanya mekanisme komunikasi dua arah yang lebih efektif sehingga dapat memperlancar interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Rachmatullah & Purwani, 2022) ini menjadi penting bagi setiap instansi pemerintah untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Transformasi pelayanan publik pada era digital dipengaruhi oleh dorongan globalisasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. (Natika, 2024). Digitalisasi memegang peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi, dalam mengelola urusan pemerintahan masing-masing. Proses transformasi digitalHal tersebut didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional. Dengan pemanfaatan sistem transformasi digital, data menjadi lebih transparan dan jelas, memungkinkan proses pengambilan keputusan berjalan secara terukur dan berlandaskan bukti nyata.

Salah satu isu krusial dalam kajian administrasi publik adalah inovasi pelayanan. Menurut Everett M. Rogers, inovasi dimaknai sebagai suatu gagasan, praktik, atau objek yang dipersepsi sebagai hal kelompok yang mengadopsinya. (Rogers, 1995) dalam (Melinda & Ichsan Kabullah, 2020)Pada praktiknya, pemerintah berupaya mewujudkan visi reformasi birokrasi melalui penerapan inovasi. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kebutuhan akan kerja sama menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan. Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang melibatkan lebih dari satu lembaga atau individu yang dilakukan secara terkoordinasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Sugianto & Aulia, 2017) kerjasama tidak hanya dipahami sebagai bentuk koordinasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pelaksanaan program maupun kebijakan sebagai wujud inovasi digital dalam birokrasi daerah, pemprov Jawa Timur juga melakukan berbagai inovasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih maju dan efisien.

Dengan Menyadari Hal tersebut Sebagai bagian dari upaya Inovasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengembangkan inovasi SATRIA ROPEM yaitu merupakan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Salah satu layanannya adalah Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER), sebuah layanan digital yang memudahkan pengajuan, pendataan, dan pengarsipan dokumen kerja sama pada pemerintahan provinsi jawa timur. Inovasi pelayanan ini adalah contoh komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kerja sama antarinstansi.

Dalam Melihat Perkembangan Ilmu Administrasi Dan pemerintahan, Inovasi Bisa dilihat atau dikaji dari Atribut Inovasi. Menurut Rogers adapun lima atribut yang bisa digunakan untuk melihat Karateristik dari sebuah Inovasi khusunya dalam Pelayanan Publik, karateristik inovasi tersebut yaitu (1) relative advantage atau disebut juga keuntungan relative (2) compatibility atau kesesuaian (3) Complexity atau kerumitan (4) triability dan yang terakhir yaitu (observability atau kemudahan diamati. Karateristik inovasi tersebut menjadi bagian utuh untuk melihat sebuah inovasi. Penggunaan dari Atribut Teori Rogers ini cocok untuk menganalisis bagaimana SIMASKER karena pada teori ini melihat bagaimana adanya inovasi dilihat dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

SIMASKER merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Biro POD sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik dalam program SATRIA ROPEM. SIMASKER berfungsi sebagai wadah terintegrasi untuk mengelola seluruh proses administrasi kerja sama, mulai Identifikasi Kerja sama, Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Pelaporan, dan Monitoring evaluasi kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, pihak ketiga maupun lainnya. Tujuan dari website SIMASKER bertujuan mempercepat alur pengelolaan dokumen kerja sama transparansi, meminimalkan human eror, serta digitalisasi arsip, website ini bermanfaat untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah secara berkala, karena seluruh data direkam secara sistematis dan dapat diakses pihak ketiga atau dinas pemerintah kerja sama.

SIMASKER memiliki landasan hukum yang merujuk perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 yang mengatur tata cara Kerja Sama dengan Daerah (KSDD) serta Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri sebagai dasar hukum dalam penyelenggarannya. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, SIMASKER berfungsi sebagai layanan digital yang memastikan seluruh prosedur birokrasi dalam pengelolaan kerja sama daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Studi administrasi telah banyak berkembang ketika berbicara tentang karateristik inovasi pelayanan publik yang berbasis digital. Penelitian tentang aplikasi PADUKO, yang menekankan penggunaan teknologi informasi sebagai cara untuk mengubah pelayanan administrasi pemerintahan, menunjukkan salah

satunya (Melinda & Ichsan Kabullah, 2020). PADUKO adalah inovasi publik digital yang dengan tujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan administrasi. Tidak hanya teknologi yang menyebabkan inovasi ini, tetapi juga perubahan dalam cara birokrasi berfungsi, peningkatan kualitas pelayanan, dan adaptasi aparatur untuk memenuhi tuntutan digitalisasi pemerintahan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa PADUKO mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi ketergantungan pada prosedur manual, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Meski demikian, PADUKO masih menemui tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem digital.

Kajian dalam bidang administrasi publik selama ini banyak menaruh perhatian pada pengembangan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi. (Wahyu Hidayat, 2021) yang menyelidiki inovasi pelayanan publik yang dibuat oleh Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang, menunjukkan salah satunya. Fokus penelitian adalah bagaimana penggunaan aplikasi digital dapat menyelesaikan masalah pelayanan publik yang selama ini dianggap lamban, rumit, tidak jelas, dan tidak efisien. Studi ini melihat inovasi melalui lima fitur utama: keuntungan relatif, kesesuaian, tingkat kerumitan, kemungkinan untuk diuji coba, dan kemudahan untuk diamati. Ini dilakukan dengan menggunakan teori inovasi Rogers. Studi menunjukkan bahwa inovasi Tangerang Live membantu pemerintah dan masyarakat, terutama dengan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan publik.

Dengan menjadikan Teori Difusi Inovasi Rogers sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini menitikberatkan pada inovasi dalam pelayanan publik serta bagaimana para aktor yang terlibat memahami, menerima, dan mengadopsi inovasi tersebut. (Handrian & Novita, 2025) Penelitian ini berfokus pada peran aktor-aktor dalam organisasi publik dalam memperkenalkan, memahami, serta mengadopsi inovasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi atau kebaruan sistem yang diterapkan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti keuntungan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, kemudahan dalam penggunaan, serta kemampuan untuk diuji dan dievaluasi hasilnya. Selain itu, adopsi inovasi dalam pemerintahan dipahami sebagai suatu proses bertahap yang dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, dukungan kelembagaan, serta kesiapan sumber daya manusia.

Sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian terdahulu, inovasi merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, (Rogers, 1995) menegaskan pentingnya adanya standar umum untuk menjelaskan karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai inovasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan pandangan tersebut, Rogers mengemukakan bahwa inovasi memiliki lima dimensi utama yang saling berkaitan secara empiris, namun tetap berbeda secara konseptual, yaitu (1) *Relative Advantages* atau keuntungan relatif. Didefinisikan sebagai tingkat seberapa suatu inovasi

dipersepsikan unggul dibandingkan dengan praktik atau konsep sebelumnya yang digantikannya. (2) *Compatibility* atau kesesuaian Kesesuaian merujuk pada tingkat derajat inovasi yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai serta pengalaman, gagasan, serta kondisi yang telah ada, termasuk kebutuhan yang berkembang. Dalam konteks ini, inovasi baru seharusnya tidak sepenuhnya memutus keterkaitannya dengan praktik atau inovasi sebelumnya, melainkan menjadi bagian dari proses perubahan yang berkelanjutan sehingga inovasi terdahulu tetap terintegrasi dalam dinamika pembaruan. (3) *Complexity* atau kerumitan Inovasi baru memungkinkan adanya tingkat kompleksitas tertentu, yaitu kondisi ketika inovasi tersebut dipersepsikan relatif sulit untuk dipahami maupun dioperasikan oleh penggunanya. (4) *Triability* atau kemungkinan dicoba Kemungkinan untuk dicoba (trialability) merujuk pada tingkat sejauh mana suatu inovasi diuji coba secara parsial sebelum diterapkan secara penuh. Melalui proses pengujian tersebut, inovasi dapat dinilai efektivitas serta manfaatnya sehingga memberikan dasar yang lebih kuat dalam menentukan nilai dan keunggulan yang ditawarkan. (5) *Observability* atau kemudahan diamati Observabilitas merujuk pada tingkat cakupan pencapaian suatu inovasi dapat dilihat dan dikenali oleh pihak lain. Menurut (Rogers, 1995) terlihat secara jelas cenderung lebih mudah dipahami serta dikomunikasikan kepada pengguna maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan kinerja yang optimal, inovasi perlu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan

METODE

Dalam Peneilitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif sendiri yaitu merupakan pendekatan penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah. Dalam studi ini kualitatif, analisis data dilakukan secara triangulasi dan penelitian dapat bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian menekankan makna (Sugiyono, 2014) Penelitian ini menggunakan type deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta memaparkan secara sistematis atribut-atribut inovasi pada Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER) yang diterapkan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Informan penelitian dipilih dari staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER) dikembangkan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital yang berperan dalam mendukung pengelolaan kerjasama daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk menilai efektivitas SIMASKER sebagai sebuah inovasi, kajian ini menggunakan perspektif teori karakteristik inovasi dari (Rogers, 1995) yang

mencakup aspek keuntungan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, tingkat kompleksitas, potensi untuk diuji coba, serta kemudahan dalam diamati. Pendekatan tersebut memberikan ruang analisis yang lebih menyeluruh, menitikberatkan dari perspektif teknis sistem informasi, serta pada tingkat penerimaan, pola pemanfaatan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam fase ini dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mendorong transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan kerja sama daerah.

Relative advantage atau keuntungan relatif

Karakteristik pertama menurut Roger adalah *relative advantage*, yaitu inovasi yang tujuan dipersepsikan baik dibandingkan dengan sistem atau cara sebelumnya. Hasil wawancara dengan Admin SIMASKER menunjukkan bahwa penerapan sistem digital membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola administrasi kerja sama. Narasumber menyampaikan bahwa SIMASKER memberikan keuntungan berupa dokumentasi yang lebih tertata, transparan, dan aman, serta memungkinkan akses data oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, digitalisasi melalui SIMASKER menggantikan proses manual menjadi sistem yang terotomatisasi, terutama dalam penomoran dokumen, penjadwalan, pembuatan undangan, *real time*

"pada intinya kalau secara bicara keuntungan memang lebih enaknya kan terdokumentasi. Terdokumentasi dengan lebih baik, terus kemudian juga lebih transparan, terus lebih aman juga dan bisa diakses sama semua orang kalau secara digital itu kan akhirnya kita tidak manual lagi. Dalam arti administrasi yang biasanya penomoran itu harus melihat (buku) dulu, cari nomor dulu, dengan adanya aplikasi kan sudah terotomatisasi. Terus penjadwalan, bikin undangan, segala macam itu langsung lewat aplikasi. Informasi yang diberikan juga ter-update secara real-time." Wawancara peneliti dengan Pak Arif selaku staff dan admin SIMASKER pada 22 desember 2025)

Perubahan yang terjadi mengindikasikan bahwa SIMASKER menawarkan keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sistem atau mekanisme yang digunakan sebelumnya. Manfaat yang diperoleh tidak terbatas pada penghematan waktu dan tenaga, tetapi juga mencakup peningkatan transparansi, perlindungan data, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, SIMASKER dapat dikatakan telah memenuhi karakteristik *relative advantage* menurut Rogers, karena mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata dalam pengelolaan administrasi kerja sama daerah sekaligus berkontribusi pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan.

Compatibility atau kesesuaian

Dalam kerangka teori inovasi Rogers, konsep kesesuaian (*compatibility*) menggambarkan tingkat keterpaduan suatu inovasi dengan nilai-nilai, kebutuhan organisasi, serta regulasi dan pola kerja yang telah diterapkan sebelumnya. Pada implementasi SIMASKER, aspek kesesuaian dapat dilihat dari keterkaitannya

dengan kebijakan kerja sama daerah serta fleksibilitas sistem dalam merespons dinamika perubahan regulasi. Suatu inovasi dinilai memiliki kesesuaian yang tinggi apabila tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, melainkan mampu memperkuat dan mempermudah pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif.

"Sebenarnya sudah lama SiMasker itu. Cuma karena adanya perubahan regulasi baru munculnya regulasi Permendagri No. 22 Tahun 2020, itu akhirnya mengharuskan alurnya berubah. Alur dan SOTK-nya berubah sehingga harus ada penyesuaian lagi. Karena dulu SiMasker itu cuma sebuah database yang terdigitalisasi. Tapi mengarah ke sekarang, implementasinya semua pengajuan kerja sama lewat SiMasker" Wawancara peneliti dengan Pak Arif selaku staff dan admin SIMASKER pada 22 desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin SIMASKER, diketahui bahwa SIMASKER pada awalnya bukan merupakan sistem yang sepenuhnya baru, melainkan telah tersedia dalam bentuk basis data digital. Namun, dinamika perubahan regulasi, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Mendagri RI Nomor 22 Tahun 2020, membawa implikasi terhadap penataan alur kerja sama serta struktur organisasi dalam pengelolaan kerja sama daerah. Kondisi tersebut mendorong transformasi SIMASKER dari sistem yang bersifat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIMASKER memiliki tingkat compatibility yang tinggi, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan regulasi tanpa mengesampingkan fungsi utamanya dalam pengelolaan kerja sama daerah. Penyesuaian terhadap alur kerja dan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) justru memperkuat posisi SIMASKER sebagai instrumen pendukung implementasi kebijakan kerja sama daerah. Dengan demikian, SIMASKER dapat dinilai selaras dengan kebutuhan organisasi dan kerangka regulasi yang berlaku, sehingga inovasi ini berpotensi diterima serta diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Complexity atau Kerumitan

Dalam perspektif teori inovasi Rogers, tingkat kerumitan (*complexity*) merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dipersepsi sulit dalam proses perancangan, pemahaman, maupun pengoperasiannya oleh pengguna. Pada pengembangan SIMASKER, dimensi kerumitan terutama tampak pada fase desain dan penyesuaian sistem terhadap perubahan dinamika alur kerja sama daerah. Sebagai sistem yang terus berkembang mengikuti perubahan regulasi serta kebutuhan organisasi, SIMASKER dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar penyesuaian tersebut tidak menghambat kelancaran proses administrasi yang sedang berlangsung.

"Kalau kerumitan... sedikit ya memang. Waktu di awal membuat SiMasker itu, karena sebelumnya aplikasi ini sifatnya hardcoded. Ternyata semakin ke sini banyak perubahan terhadap alurnya untuk pengajuan kerja sama. Jadi SiMasker yang sekarang harus dibentuk lebih fleksibel. Waktu bikin sama teman-teman (tim IT), kita konsep bagaimana caranya agar fleksibel. Kita bikin konsepnya seperti puzzle. Jadi ketika nanti ada perubahan alur atau

perubahan dokumen, semua bisa diakomodir di aplikasi SiMasker." Wawancara peneliti dengan Pak Arif selaku staff dan admin SIMASKER pada 22 desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin SIMASKER, tingkat kerumitan dalam implementasi SIMASKER lebih dominan dirasakan pada fase awal pengembangan sistem. Pada tahap tersebut, SIMASKER masih dibangun dengan konsep hardcoded sehingga memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan perubahan alur maupun dokumen kerja sama. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas sistem, tim pengembang bersama admin melakukan pembaruan desain dengan mengembangkan SIMASKER sebagai aplikasi yang lebih adaptif. Konsep ini dianalogikan seperti sebuah puzzle, di mana setiap perubahan pada alur kerja atau dokumen dapat diakomodasi tanpa perlu membangun ulang sistem secara menyeluruh. Meskipun SIMASKER menghadapi tingkat kompleksitas pada tahap pengembangannya, kerumitan tersebut dapat dikelola melalui penerapan desain sistem yang fleksibel dan responsif. Dengan pendekatan tersebut, kompleksitas teknis tidak menjadi kendala utama dalam operasional SIMASKER, khususnya dari perspektif admin sebagai pengelola sistem. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat complexity SIMASKER masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan, sehingga tidak menghambat efektivitas inovasi dalam mendukung pengelolaan kerja sama daerah.

Triability atau kemungkinan Dicoba

Kemungkinan untuk diuji coba (*trialability*) dalam teori inovasi Rogers merujuk pada tingkat uji coba suatu inovasi dalam skala terbatas sebelum implementasi secara menyeluruh. Aspek ini krusial untuk menjamin bahwa inovasi sesuai untuk pengguna serta siap digunakan tanpa menimbulkan kendala berarti pada tahap implementasi. Dalam konteks SIMASKER, uji coba menjadi tahapan krusial untuk menjamin kesiapan sistem sebelum digunakan oleh seluruh perangkat daerah.

"Kalau uji coba itu wajib ya di tempat kita. Sebelum kita sosialisasikan ke teman-teman perangkat daerah untuk diimplementasikan, kita uji coba secara internal dengan tim IT. Kita sebagai fasilitator juga mengecek apakah program sudah jalan sesuai manualnya atau ada yang kurang. Ketika sudah memenuhi istilahnya UAT (User Acceptance Test) kalau tidak salah baru kita sosialisasikan ke perangkat daerah. Takutnya ada masukan yang tidak ter-cover di aplikasi" Wawancara peneliti dengan Pak Arif selaku staff dan admin SIMASKER pada 22 desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin SIMASKER, diketahui bahwa sebelum disosialisasikan dan diimplementasikan kepada perangkat daerah, SIMASKER terlebih dahulu melalui tahap uji coba secara internal. Proses pengujian ini melibatkan tim teknologi informasi serta pihak biro yang berperan sebagai fasilitator, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh fitur dan alur kerja dalam aplikasi telah berjalan sesuai dengan pedoman atau manual penggunaan. Tahap uji coba tersebut sekaligus berfungsi sebagai *User Acceptance Test (UAT)*, yang memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap sistem guna mengidentifikasi

kekurangan maupun masukan yang belum terakomodasi dalam pengembangan aplikasi.

Observability atau kemudahan diamati.

Dalam teori inovasi Rogers, kemudahan untuk diamati (*observability*) merujuk pada sejauh mana dampak dan manfaat suatu inovasi dapat terlihat secara nyata oleh para penggunanya. Karakteristik ini memiliki peran penting karena tingkat keterlihatan hasil inovasi akan memengaruhi pemahaman, tingkat penerimaan, serta keberlanjutan penggunaan inovasi tersebut. Pada pelaksanaan SIMASKER, dimensi *observability* tercermin melalui pelaksanaan sosialisasi serta pembaruan sistem yang dilakukan secara bertahap kepada perangkat daerah, sehingga hasil dan manfaat penggunaan sistem dapat dirasakan dan diamati secara langsung.

Iya, itu dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024 sampai 2025 kemarin baru kita sosialisasi lagi. Sudah dua tahapan sosialisasi ke perangkat daerah. Nanti kalau ada perubahan akan kita informasikan ke teman-benar perangkat daerah terkait update alurnya. Sementara ini semua kebutuhan pengajuan kerja sama sampai proses fasilitasi naskah kerja sama sudah terakomodir. Wawancara peneliti dengan Pak Arif selaku staff dan admin SIMASKER pada 22 desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin SIMASKER, proses sosialisasi penggunaan SIMASKER dilaksanakan secara bertahap kepada jajaran perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2024 hingga 2025. Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai pengenalan aplikasi, tetapi juga sebagai media untuk memperlihatkan secara langsung manfaat sistem serta perubahan alur kerja sama yang dihasilkan oleh penerapan SIMASKER. Selain itu, pengelola sistem menyampaikan bahwa setiap adanya penyesuaian alur maupun pembaruan fitur, informasi tersebut akan kembali disampaikan kepada perangkat daerah agar seluruh pengguna dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem yang berjalan., karena hasil dan manfaat penggunaannya dapat diamati secara nyata melalui implementasi sistem serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengguna dapat melihat secara langsung perkembangan proses pengelolaan kerja sama, mulai dari tahapan pengajuan hingga fasilitasi naskah kerja sama, yang seluruhnya telah terintegrasi dalam satu platform. Dengan demikian, tingkat keterlihatan hasil inovasi ini memperkuat penerimaan SIMASKER sebagai sistem digital yang efektif dan relevan dalam mendukung tata kelola kerja sama daerah.

SIMPULAN

SIMASKER merupakan inovasi tata kelola kerja sama daerah yang berkembang secara adaptif seiring dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan analisis menggunakan teori difusi inovasi Rogers, SIMASKER menunjukkan karakteristik inovasi yang mendukung penerimaan dan keberlanjutan implementasi, khususnya dari aspek compatibility, complexity, trialability, dan observability. Sistem ini dinilai selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku,

mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tanpa menghilangkan fungsi utama pengelolaan kerja sama daerah, serta dirancang secara fleksibel untuk mengendalikan tingkat kerumitan teknis. Proses uji coba internal dan sosialisasi bertahap juga memperkuat kesiapan pengguna serta memungkinkan manfaat SIMASKER dapat diamati secara nyata oleh perangkat daerah. Dengan demikian, SIMASKER lebih dari sekadar memainkan peran sebagai sistem digital dalam ranah administratif maupun sebagai instrumen pendukung implementasi kebijakan kerja sama daerah yang efektif dan berkelanjutan. Ke depan, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji tingkat adopsi SIMASKER dari perspektif pengguna di perangkat daerah serta menganalisis dampak implementasinya terhadap efisiensi dan kualitas pengelolaan kerja sama daerah dalam jangka panjang. Penulis mengucapkan hal terima kasih sebgaimana intuk Biro POD yang telah memberikan kesempatan, data, Serta apresiasi disampaikan atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian. Terimakasih juga ditujukan kepada para pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan dan pihak-pihak yang terlibat pendampingan serta dukungan yang diberikan selama kegiatan penelitian dan penyusunan naskah dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis memberikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan fasilitasi publikasi artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat atas bimbingan serta bantuan yang diberikan selama kegiatan penelitian dan penulisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Handrian, E., & Novita, M. (2025). Adopsi Inovasi Kebijakan Digital yang Inklusif: Studi Kasus Aplikasi SIPINTAR PEDULI di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 105-119. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21882>
- Melinda, M., & Ichsan Kabullah, M. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Innovation of Online Population Administrative Services (Paduko) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 128-144.
- Miles, M. B. & H. A. (1994). *Qualitative data analysis (2nd Edition)*. Sage Publications. .
- Natika, L. (2024). *TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK* (Vol. 6). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Pancasakti Makassar, U. (2023). *PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL: STUDI LITERATUR DIGITAL ERA PUBLIC SERVICES: LITERATURE REVIEW* Anirwan 2. 4(1), 23-31.
- Rachmatullah, N., & Purwani. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan: E-Government. *JURNAL FASILKOM*, VOLUME 12(NO1), 14-16. <https://katadata.co.id/desysetyowati>

- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations, Fourth Edition. Elements of Diffusion.* .
- Sugianto, C. A., & Aulia, I. (2017). *Pengembangan Sistem Informasi Kerjasama Berbasis Web Studi Kasus: Pada SEAMOLEC.* 1(2), 137–145. <http://jurnal.iaii.or.id>
- Wahyu Hidayat. (2021). *ANALISIS INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI TANGERANG LIVE DI KOTA TANGERANG.* Volume 3(Nomor 1), 48–56. <http://tangerangkota.go.id/peresmian-tangerang->